

FESTIVAL KLANGENAN DI PSG Lestarikan Kuliner Adiluhung



KR-Sukro Riyadi

Suasana festival Klengenan di Pasar Seni Gabusan.

BANTUL (KR) - Festival Klengenan di Pasar Seni Gabusan (PSG) Sewon Bantul yang digelar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul, sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan kuliner zaman dulu alias jadul, seni tradisional sampai pameran barang antik. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai, Selasa (30/4) hingga Sabtu (4/5) dibuka Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih.

"Festival Klengenan tahun 2024 ini dilatarbelakangi keinginan kita semua untuk melestarikan kebudayaan adiluhung kita, baik itu dalam wujud kuliner ataupun kerajinan," ujar Bupati didampingi Plt Kepala DKUKMPP Bantul, Husin Bahri, usai

membuka Festival Klengenan 2024 di PSG. Halim menjelaskan, dalam Festival Klengenan tersebut juga disajikan beragam kuliner atau jajanan tempo dulu. Hal tersebut sebagai salah satu komitmen Pemkab Bantul dalam mewariskan kepada generasi muda terkait khazanah kuliner masa lalu.

"Kita ingin anak cucu kita masih menyukai kuliner jajanan tradisional, karena kuliner tersebut merupakan warisan budaya dan harus dilestarikan," ujar Halim.

Sedang Plt Kepala DKUKMPP Bantul, Husin Bahri, mengatakan Festival Klengenan akan sampai 4 Mei. Program tersebut akan didukung dari Dana Keistimewaan (Danais). Spirit dari Festival

Klengenan tersebut ialah memperkokoh Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta industri kreatif Kabupaten Bantul sebagai budaya benda.

Dalam Festival Klengenan itu terdapat 55 pelaku usaha lokal ambil bagian. Dengan rincian pelaku usaha produk craft atau kerajinan dan kuliner tradisional.

Dalam Festival Klengenan tersebut menyajikan aneka ragam kegiatan di antaranya festival kuliner tradisional, pameran barang antik dan pertunjukan seni tradisional di Kabupaten Bantul.

Husin mengatakan, salah satu kuliner khas Bantul yang menjadi daya tarik di Festival Klengenan adalah kuliner kicak. (Roy)-f

BAWASLU BERI PERINGATAN

Jaga Netralitas ASN, TNI dan Polri di Pilkada

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul menyampaikan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul, Dewi Nurhasanah, Selasa (30/4), menurkan pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Komandan Kodim 0729 serta Kepala Kantor Kemenag Bantul perihal netralitas ASN, TNI dan Polri ini.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa semua ASN, TNI dan Polri diminta untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik selama tahapan Pilkada berlangsung, terutama untuk tahapan pencalonan dan masa kampanye.

Selain itu Bawaslu Bantul juga mengingatkan agar ASN, TNI, Polri tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pa-

sangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dewi juga menegaskan, merujuk pada Perbawaslu No 6 Tahun 2018 Pasal 3 dinyatakan bahwa Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar

ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

Sementara Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menambahkan terkait dengan pengawasan penggantian pejabat menjelang Pilkada, Bawaslu Bantul telah melakukan

koordinasi intensif dengan BKPSDM Bantul. Hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan agar dalam penggantian pejabat Pemda tetap mengacu pada ketentuan regulasi.

Apabila dilihat dari tahapan dan jadwal Pilkada yang diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2024 maka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Oleh karena itu Didik berharap prosedur penggantian pejabat apabila melewati tanggal 22 Maret 2024 harus ditempuh dengan mengajukan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. (Jdm)-f

HARI JADI KE-77 KALURAHAN SUMBERAGUNG JETIS

'Gumregah Nyawiji' Bangun Sumberagung

BANTUL (KR) - Rangkaian Hari Jadi ke-77 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Bantul digelar kirab budaya, Selasa (30/4). Tahun ini mengambil tema 'Gumregah Nyawiji Bangun Sumberagung'.

Ketua Panitia Hari Jadi Kalurahan Sumberagung Jetis Bantul, Randy Gumelar Wicaksono, menjelaskan dalam kirab budaya tersebut dimulai dari Pasar Barongan hingga Lapangan Sumberagung Jetis Bantul. "Sebanyak 17 perwakilan sesuai jumlah pedukuhan di Sumberagung. Mereka menampilkan berbagai kesenian, termasuk pakaian hasil daur ulang sampah," ujar Randy.

Prosesi kirab dimulai ketika bregada mulai bergerak untuk mengawal empat gunung. "Empat gunung tersebut sebenarnya sebagai refleksi bahwa dahulu Sumberagung terbagi menjadi empat kalurahan, tetapi sekarang sudah menjadi satu.



KR-Sukro Riyadi

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih didampingi Lurah Sumberagung Jetis Bantul, Yudi Fahrudin ketika menghadiri Hari Jadi Sumberagung.

Sehingga dalam Hari Jadi tahun ini mengambil tema 'Gumregah Nyawiji Bangun Sumberagung,' ujar Randy.

Dijelaskan, rangkaian kegiatan Hari Jadi Kalurahan Sumberagung

di antaranya, tanggal 3, 4 dan 5 Mei digelar bazar, UMKM. Kemudian masih ditanggal 4 Mei digelar festival dolanan, perlombaan catur, bulu-tangkis, tenis meja. (Roy)-f

PUNYA PERAN STRATEGIS

Ditarget, 2024 Semua Padukuhan Terbentuk Kelompok Jaga Warga

BANTUL (KR) - Satpol PP Bantul sejak 2022 telah melakukan sosialisasi dan pembentukan Kelompok Jaga Warga di masing-masing padukuhan di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya terdiri dari 17 Kapanewon, 75 kalurahan atau 933 padukuhan.

Menurut catatan di Kantor Satpol PP Bantul, sampai saat ini dari 933 padukuhan tersebut yang sudah membentuk Kelompok Jaga Warga ada 823 padukuhan. Yang belum membentuk masih ada 110 padukuhan. Menurut Kepala Satpol PP Bantul R Jati Bayubroto SH MHum didampingi Sekretarisnya Agung Kurniawan SSI, Satpol PP Bantul menarget tahun 2024 semua padukuhan di Bantul yang jumlahnya 933 padukuhan sudah membentuk Kelompok Jaga Warga.

Tidak ada kendala dalam proses pembentukan Kelompok Jaga Warga. Terkait anggaran memang tergetnya baru selesai th. 2024 ini. "Alhamdulillah tanggapan warga masyarakat sangat positif dan tidak ada kendala dalam mencari kader Kelompok Jaga Warga. Maka pada Mei 2024 rencana akan dilakukan pengukuhan beberapa Kelompok Jaga Warga oleh Bupati Bantul. Hanya permasalahannya, bahwa kewenangan pembinaan Kelompok Jaga Warga ada di DIY sehingga Satpol PP Bantul tidak dapat menganggarkan kegiatan pertemuan pembinaan Kelompok Jaga Warga," kata Jati.

Menurutnya, Kelompok Jaga Warga bisa diandalkan untuk berperan menangani persoalan lingkungan di tingkat padukuhan. Partisipasi aktif ini patut diapresiasi karena mereka

tidak digaji, tetapi semangat untuk menjaga lingkungan masing-masing sangat luar biasa.

Sesuai amanat Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023, Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas, membantu menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Melakukan koordinasi dengan Pranata Sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Kelompok Jaga Warga juga mempunyai fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial, perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung, sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan petugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Kelompok Jaga Warga berwenang, mengundang pihak yang berkepentingan, meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan, melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua Pengurus Kampung dalam menyelesaikan suatu perma-



Sosialisasi dan pembentukan Kelompok Jaga Warga di Bantul

salahan.

Karena tugas, wewenang dan peran Kelompok Jaga Warga yang sangat strategis tersebut, maka pentingnya dibentuk Kelompok Jaga Warga di masing-masing padukuhan. Dengan peran jaga warga itulah maka jika ada indikasi kenakalan remaja, teroris, ataupun konflik sosial serta hal-hal yang tidak diinginkan di wilayahnya masing-masing dapat secepatnya bisa diketahui dan ditangani. Keuntungan dibentuknya Kelompok Jaga Warga, jika terjadi perselisihan atau konflik sosial di masyarakat maupun pelanggaran hukum yang kecil bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat padukuhan.

"Selain itu Kelompok Jaga Warga



Musyawarah Kelompok Jaga Warga di Bantul

KR-Judiman



KR-Judiman



KR-Judiman

Kelompok Jaga Warga di Padukuhan Mrisi Tirtonirmolo Kasihan. Aktifitas Kelompok Jaga Warga bersama masyarakat

memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakat, sehingga jika terjadi pelanggaran hukum kecil maupun konflik warga bisa diselesaikan secara musyawarah, tanpa harus dibawa ke Polsek atau masuk ke ranah hukum bahkan ke meja pengadilan. Kecuali kasus pelanggaran yang besar. Sehingga peran Kelompok Jaga Warga menjadi pembantu yang mampu mendamaikan setiap persoalan dari warga sampai tuntas di tingkat padukuhan. Penyelesaian konflik secara damai juga dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah leburnya konflik secara luas," papar Jati.

Dibentuknya Kelompok Jaga Warga juga merupakan upaya menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Karena itu, kedepan Kelompok Jaga Warga diharapkan menjadi salah satu garda depan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan kondusifitas wilayah, mitigasi potensi gangguan trantibum, menjaga pranata sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. (Jdm)